

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA MANADO

Oleh :
Alfred Lelau

ABSTRACT

Indonesia as a developing country to this day still cannot be separated from the social problems that gripped the community, especially the socio-economic problems and the problems this government works. For field play an important role in order to protect its people from all socio-economic problems worse excesses, life in society a reality if in the absence of the role of government, the people will give birth to various forms of violence and chaos. The most frightening Scourge of the impact of socio-economic problems is unemployment.

Employment issues in Indonesia today has reached a very alarming condition Characterized by the number of unemployed and underemployed large, relatively low incomes and uneven. If the problem is allowed to continue, this will be a "time bomb" Unemployment and underemployment are high is a waste of resources available to families and the public burden, the main source of poverty and Encourage Social Unrest and crime, and could hamper long -term development. Manado as a models of eco-tourism city in the stretcher by the City of Manado, grounded in the economic development of the agricultural sector to the manufacturing industry therefore closely related workforce that will minimize the impact on the unemployment rate.

Historical development of ecotourism in Indonesia can be separated in three interrelated stages, each colonial influence, the Conference agreement on biodiversity and ecotourism community development. Unemployment rate in the city of Manado in 2010-2012 that in 2010 the number of unemployed in the city of Manado reached 25 841 inhabitants, in 2011 and 2012 the number reached 24 744 in Manado City pengguran still reached 23.361 inhabitants. The following table of the number of unemployed in Manado City from 2010 to 2012.

Keywords: government policy, unemployment

I. Latar Belakang.

Indonesia sebagai negara berkembang sampai saat ini masih belum bisa dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang mencengkeram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi serta masalah lapangan pekerjaan. Hal ini pemerintah memegang peranan yang penting dalam rangka melindungi masyarakatnya dari segala eksese buruk masalah sosial ekonomi, suatu realitas kehidupan dalam masyarakat jika tanpa adanya peranan pemerintah, maka masyarakat akan melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan kekacauan. yang menjadi momok paling menakutkan dari dampak masalah sosial ekonomi adalah pengangguran.

Pengangguran memang masih menjadi masalah aktual yang menjadi bahasan panjang sejak orde baru tumbang dan Indonesia dicap sebagai negara yang terganggu perkembangan perekonomiannya saat menghadapi krisis multi dimensi yang diawali pada Oktober 1997 puncaknya ketika beberapa perusahaan melakukan PHK besar-besaran karena tak lagi mampu membayar gaji karyawan akibat *income* yang didapat tidak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Masalah Pengangguran adalah keadaan terkendalanya pemenuhan

hak atas kesejahteraan dan hak atas pekerjaan. Tingginya angka pengangguran dapat membawa bangsa berada pada bibir kehancuran yang sulit dihindarkan. Jika hal ini benar-benar terjadi maka tidak saja negara tidak menjalankan kewajiban dasarnya juga dapat dinyatakan pemerintah telah mencederai hak asasi rakyatnya. Pemerintah dipandang tidak serius mengatasi masalah pengangguran.

Sejatinya the Founding Fathers yang menyusun UUD 1945 sangat sadar akan pentingnya jaminan hak atas pekerjaan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan : "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa" Selanjutnya secara kongkrit pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan : "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Hal ini berarti secara konstitusional negara berkewajiban menyediakan kesempatan kerja yang cukup, produktif dan remuneratif yang secara gamblang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi : "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan*

kerja" 10 Jaminan terhadap hak atas pekerjaan juga ditegaskan di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan : "Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak."

Manado sebagai kota yang sedang berkembang di Indonesia dan sebagai ibukota provinsi Sulawesi Utara tidak luput dari masalah pengangguran, pemerintah kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat juga harus mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah pengangguran yang ada di kota tersebut.

Manado merupakan kota yang sedang berkembang sekaligus merupakan kota ekowisata, cukup berperan dalam menumpaskan masalah pengangguran. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengangguran di kota Manado mencapai angka 25.841 jiwa, pada tahun 2011 mencapai 24.744 hingga 2012 jumlah pengangguran di Kota Manado masih mencapai angka 23.361 jiwa. Atas pertimbangan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Manado.

II. Konsep Kebijakan

Kebijakan (policy) : Random 1968 : 1027.

1. *A definite course of action adopted for the sake expediency, facility, etc;*
2. *Action or procedure conforming to or considered with reference to prudence or expediency;*
3. *Prudence, practical wisdom or expediency.*

Dari ketiga penjelasan di atas dapat ditarik konsep dasar bahwa : kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata dari kebijaksanaan.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Easton (1969) → Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang

merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda.

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

2. Formulasi kebijakan.

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat. Warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung, dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan.

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja. Melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan. program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

III. Kebijakan Yang Telah Dilakukan Pemerintah

Di dalam setiap kebijakan setidaknya ditemukan tiga motivasi atau tujuan penting yang mendasarinya :

Pertama : meningkatkan kesempatan kerja (Job Creation). Hampir setiap isu yang dirumuskan di dalam kebijakan senantiasa mengarah pada penggunaan tenaga kerja seoptimal mungkin. Alasan yang mendasari adalah bahwa pengangguran merupakan suatu opportunity cost yang mengakibatkan produksi nasional berkurang dari semestinya. Hubungan antara tenaga kerja dan output sering dijadikan indikator ketenagakerjaan. Upaya-upaya meningkatkan kesempatan kerja dapat beresal dari pemerintah melalui program-program pembiayaan langsung maupun tidak langsung dan dari sektor swasta melalui perencanaan investasinya sendiri.

Kedua, memperbaiki fiscal. Motivasi kedua merupakan konsekuensi dari berbagai peran pemerintah dalam pembangunan antara lain : pelaku, pengendali, pengawas, pemelihara, pengamanan, dan pemulih (rehabilitasi) dari proses-proses, hasil-hasil, dampak-dampak dan tujuan-tujuan pembangunan. Energi (government expenditure) untuk

menjalankan peran tersebut harus diambil dari seluruh stakeholder.

Ketiga, pembangunan daerah miskin, sangat dimaklumi bahwa tidak seluruh stakeholder menerima atau tersentuh hasil-hasil pembangunan. Mereka umumnya tetap berada pada ketertinggalan, keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan serta pengangguran. Sebagai suatu bentuk ketidakefisiensi, hal-hal tersebut harus direhabilitasi melalui kebijakan dan program yang terarah dan terintegrasi.

Adapun beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam membantu mengatasi masalah pengangguran, di antaranya:

2.2.1 Kebijakan Subsidi

Subsidi tidak berupa aktivitas pemerintah secara langsung tetapi lebih kepada dorongan lingkungan secara lokal maupun nasional sedemikian rupa sehingga aktivitas perekonomian berjalan secara optimum. Kebijakan subsidi tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen yang memuat bermacam-macam insentif, daya tarik, kemudahan-kemudahan untuk merangsang investasi baru dan perluasan proyek.

2.2.2 Bantuan Pinjaman.

Bantuan pinjaman sering diberikan atas keputusan pemerintah karena akses terhadap pasar modal rendah dan guna membantu

pengangguran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Ada tiga macam jenis bantuan pinjaman ini :

Pertama, pemerintah dapat menggunakan dana pajak, upaya ini pada dasarnya adalah memutar dana berjumlah besar yang relatif tidak aktif yang dimiliki oleh lembaga lain.

Kedua, pemerintah dapat bertindak sebagai penjamin sewaktu-waktu bila pengusaha mengalami macet.

Ketiga, pemerintah menetapkan aturan penjaminan bagi lembaga keuangan yang member kredit investasi.

2.2.3 Bantuan Infrastruktur.

Pemberian bantuan infratraktur oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi pengangguran yang ingin memiliki tempat usaha.

2.2.4 Program Pelatihan dan Kemitraan.

Program ini adalah umum diterapkan untuk mendorong pertumbuhan tenaga kerja. Programnya antara lain; meningkatkan ketrampilan masyarakat, memberikan ketrampilan spesifik kepada masyarakat karena akan dimanfaatkan oleh perusahaan, memberikan ketrampilan dasar umum untuk menanamkan strategi memperoleh lowongan kerja.

IV. Jenis dan Macam Pengangguran

A. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian.

C. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran. Produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Adapun sifat-sifat pengangguran antara lain :

Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)

Meliputi pengangguran sukarela maupun pengangguran karena terpaksa. Orang-orang yang menganggur secara sukarela adalah mereka yang tidak ingin menerima pekerjaan yang sebenarnya bisa mereka peroleh, mungkin karena mereka memiliki cara atau sumber lain untuk menopang hidupnya. Pengangguran karena terpaksa merupakan suatu keadaan di mana para pencari kerja ingin bekerja, akan tetapi tidak ada pekerjaan yang tersedia baginya. Pengangguran terbuka paling banyak terdapat di berbagai kota di negara-negara berkembang.

Pengangguran Terselubung (Disguised Underemployment)

Suatu situasi kesenjangan antara beban tugas dengan sumber daya (khususnya tenaga kerja) yang ada. Sepintas lalu, nampak bahwa semua pekerja terdaya-gunakan, tetapi dalam kenyataannya banyak waktu yang tersia-siakan oleh para pekerja tersebut yang sering melakukan kegiatan yang tidak produktif di tengah-tengah jam kerja.

Masalah ketenagakerjaan di negara-negara Dunia Ketiga ternyata mempunyai dampak dan implikasi yang jauh lebih kompleks bila dibandingkan dengan soal ketenagakerjaan di negara-negara maju. Oleh karena itu, setiap upaya pemecahannya memerlukan bermacam-macam pendekatan yang lebih rumit daripada sekedar penerapan kebijakan ala Keynes yang dahulu lazim dipraktikkan oleh negara-negara maju untuk meningkatkan permintaan agregat dalam rangka menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para warganya.

Apapun dimensi dan penyebab timbulnya pengangguran di negara-negara Dunia Ketiga, semuanya selalu berkaitan dengan kerapuhan mental manusianya yang diakibatkan oleh buruknya lingkungan dan taraf hidup warisan penjajahan. Untuk itu diperlukan kebijakan bersama dan terpadu antara negara berkembang dengan negara maju. Negara Dunia Ketiga perlu mengubah kebijakan domestiknya dengan melibatkan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan pembangunan ekonomi dan sosialnya yang paling pokok.

Sedangkan negara-negara maju perlu meninjau kembali dan mengubah kebijakan ekonominya terhadap masyarakat negara Dunia Ketiga, terutama di bidang perdagangan, bantuan luar negeri.

seita pengalihan teknologi. Empat Aspek Masalah Ketenagakerjaan di Negara Berkembang :

Pengangguran Terdidik

Di sejumlah negara berkembang, semakin tinggi pendidikan seorang maka semakin besar kemungkinan ia menganggur. Penyebabnya adalah, mereka yang tidak terdidik tidak akan makan kalau tidak bekerja sehingga mereka mau melakukan pekerjaan apa saja demi sesuap nasi. Sedangkan bagi mereka yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, apalagi sampai kejenjang universitas, mereka hanya mau bekerja kalau hal itu memberi uang, status, atau kepuasan yang relatif tinggi.

V. Kebijakan Pemerintah Tentang penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Manado

Di dalam setiap kebijakan setidaknya ditemukan tiga motivasi atau tujuan penting yang mendasarinya :

Pertama : meningkatkan kesempatan kerja (Job Creation). Hampir setiap isu yang dirumuskan di dalam kebijakan senantiasa mengarah pada penggunaan tenaga kerja seoptimal mungkin. Alasan yang mendasari adalah bahwa pengangguran merupakan suatu opportunity cost yang mengakibatkan produksi nasional berkurang dari semestinya. Hubungan antara tenaga kerja dan

output sering dijadikan indikator ketenagakerjaan. Upaya-upaya meningkatkan kesempatan kerja dapat berasal dari pemerintah melalui program-program pembiayaan langsung maupun tidak langsung dan dari sektor swasta melalui perencanaan investasinya sendiri.

Kedua, memperbaiki fiscal. Motivasi kedua merupakan konsekuensi dari berbagai peran pemerintah dalam pembangunan antara lain : pelaku, pengendali, pengawas, pemelihara, pengamanan, dan pemulih (rehabilitasi) dari proses-proses, hasil-hasil, dampak-dampak dan tujuan-tujuan pembangunan. Energi (government expenditure) untuk menjalankan peran tersebut harus diambil dari seluruh stakeholder.

Ketiga, pembangunan daerah miskin, sangat dimaklumi bahwa tidak seluruh stakeholder menerima atau tersentuh hasil-hasil pembangunan. Mereka umumnya tetap berada pada keteringgalan, keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan serta pengangguran. Sebagai suatu bentuk ketidakefesiensi, hal-hal tersebut harus direhabilitasi melalui kebijakan dan program yang terarah dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di gambarkan di atas melalui wawancara tersebut peneliti juga menemukan beberapa indikator

penyebab menurunnya tingkat pengguran di kota Manado meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah kota Manado dalam mengatasi tingkat pengangguran. Pemerintah kota Manado telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah kebijakan Lembaga pendidikan keterampilan (LPK), guna menyiapkan tenaga kerja yang kreatif dan profesional tanpa membedakan kelas atau jenjang pendidikan dari tiap-tiap individu, berikut adalah macam-macam pendidikan ketrampilan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota manado :

1. Latihan ketrampilan tatarias.
2. Latihan ketrampilan tataboga.
3. Latihan ketrampilan montir.
4. Latihan ketrampilan mengemudi.
5. Latihan ketrampilan elektronik teknologi (IT)

Pemerintah kota Manado juga sedang menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna menyelesaikan masalah pengguran inilah harapan pemerintah, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Karena ada masyarakat di perkotaan berada pada sektor-sektor informal terdiri dari pedagang kaki lima, buruh pabrik dan pelabuhan atau tidak memperoleh tempat

dimana-mana (termasuk kelak menjadi pengemis dan gelandangan)

Contoh pengembangan diri dalam usaha mengemudi, montir, tata rias, tata boga dan lain-lain. Selain itu dalam upaya penurunan tingkat pengangguran di kota Manado, pemerintah juga melakukan berbagai terobosan seperti melakukan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis.

Terjadinya penurunan tingkat pengangguran pada tiga (3) tahun terakhir tersebut berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah kota Manado yaitu membentuk Lembaga Pelatihan Ketrampilan (PLK), upaya menghadirkan investor, serta upaya menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sedang di upayakan oleh pemerintah kota Manado.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan baik karena adanya kesadaran penuh dari pemerintah bahwa masalah pengangguran adalah tanggungjawab pemerintah yang harus diselesaikan dengan serius serta hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dengan baik dan tepat pada sasaran yaitu pada masyarakat usia kerja dan pada investor yang mau berinvestasi di kota Manado.

Upaya peningkatan produktifitas masyarakat secara langsung dilakukan dengan memperbaiki kehidupannya, meningkatkan akses kepada infrastruktur dan fasilitas jasa sosial, dan meningkatkan permintaan akan tenaga kerjanya.

Kegiatan yang yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan skill dan wawasannya.
2. Menjamin akses golongan pengangguran terhadap fasilitas jasa-jasa sosial dan infrastruktur.
3. Dalam jangka pendek adalah memberikan proyok agar dapat mengamankan nasipnya.

Tingkat pengangguran bisa diminimalisir apabila tersedianya lapangan pekerjaan yang di fasilitasi oleh pemerintah atau para pengangguran mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri jika dia memiliki kemampuan dan keahlian pada bidang-bidang tertentu serta didukung oleh modal (uang/tempat) yang bisa menopang kemampuannya.

Pendidikan formal merupakan penopang dasar seseorang meningkatkan kreatifitasnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tida semua orang bisa menikmati dunia pendidikan formal dikarenakan oleh biaya pendidikan yang meningkat, oleh sebab itu pemerintah sudah berupaya memberikan pelayanan

pendidikan yang baik dan mengupayakan agar semua orang usia sekolah bisa menikmati dunia pendidikan formal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berupa menekan biaya pendidikan dari tingkat SD hingga SMA bahkan akan berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang gratis mulai dari jenjang SD hingga SMA dan didukung oleh kualitas dan mutu pendidikan yang baik.

Melihat fenomena masih tingginya angka pengangguran ini, tentunya pemerintah tidak diam begitu saja. Pemerintah merencanakan upaya-upaya untuk penurunan angka pengangguran ini dengan rencana yang terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan komitmen dalam bentuk usaha yang serius dari seluruh kalangan, yakni instansi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Implementasi komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan penciptaan lapangan kerja baik formal maupun informal, program padat karya, memperbanyak pelaksanaan bursa kerja (job fair) oleh pemerintah dan swasta dan peningkatan SDM dengan membangun kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing.

Upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja,

diwujudkan dengan mencetuskan dan melaksanakan, (tentunya bersama dengan dunia usaha) program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E) dan Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP). Di sektor formal, penciptaan lapangan kerja baru membutuhkan kehadiran investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas kerja. Hubungan industrial yang kondusif dan harmonis menjadi syarat agar investor tertarik dan membuka investasi baru.

Strategi utama dalam MP3E, salah satunya peningkatan kemampuan SDM. Hal itu dilakukan dengan ada 2 (dua) cara, yaitu pertama, melalui jalur pendidikan formal, dan kedua, melalui jalur pelatihannya. Untuk pendidikan formal, pemerintah sudah memasukkan program pendidikan universal 12 tahun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah (RKAP) 2013. Sedangkan untuk jalur pelatihan, langkah konkret pelatihan dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan kesempatan pemagangan bagi kalangan lulusan SMA, SMK dan sarjana. Hal ini dilakukan untuk memastikan dunia pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia usaha, serta memastikan lulusan pendidikan terserap di pasar kerja. Selain itu, meningkatkan peran Balai

Latihan Kerja (BLK) untuk melatih para lulusan pendidikan dan para pencari kerja agar siap bekerja. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja. Bahkan sebagian besar lulusan BLK langsung diserap pasar kerja. Ini karena program pelatihan memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri. Selanjutnya, perlu ada penyelarasan antara pasokan maupun permintaan tenaga kerja yang dapat dilakukan pemerintah.

Tetapi yang paling penting dari apa yang disebutkan tadi diatas adalah bagaimana pemerintah dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan pada pencari kerja pendidik. Karena dari wirausaha tersebut, sesungguhnya banyak sekali manfaat bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan peneliti sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah terhadap penurunan tingkat pengangguran di tahun 2012 (suatu studi di kota Manado) telah berjalan dengan baik walaupun kebijakan tersebut masih tergolong sedikit.
2. Kebijakan pemerintah terhadap penurunan tingkat pengangguran, yang telah di upayakan ini bisa berjalan dengan baik karena ada kerja sama antara pemerintah, investor serta masyarakat umum.
3. Lembaga pelatihan ketrampilan merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota yang cukup berhasil di kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Badjuri dan Teguh Yuwono, (2002), "*Administrasi Kebijakan*

Publik", Universitas Diponegoro, Semarang.

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003.

Arikunto Suharsimi, (2000), *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.

Dunn, William N. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah MadaUniversity Press.

Madani Muhlis, 2011, *Kebijakan Publik*, Jakarta Graha Ilmu.

- Moeleong, L. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosdakarya .
- Nugroho Rian, 2009, *Publik Policy*, Jakarta, PT. Elex Media.
- Nugroho iwan dan Dahuri Rokhmin, 2012, *Pembangunan Wilayah*, Jakarta : LP3ES
- Poewadarminta, S. 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Sarundajang, S.H. 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka.
- Yanuar Ikbar, 2007, *Ekonomi Politik Internasional*, Jakarta, Rafika.